

SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMBERDAYAAN PETANI
KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**



**OLEH
ARYANTI PUJI ARLIAN
105641103520**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKSSAR**

2024

SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMBERDAYAAN PETANI
KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)

Sarjana Ilmu Politik (S.IP)

Disusun Dan Diajukan Oleh:

ARYANTI PUJI ARLIAN

Nomor Induk Mahasiswa: 105641103520

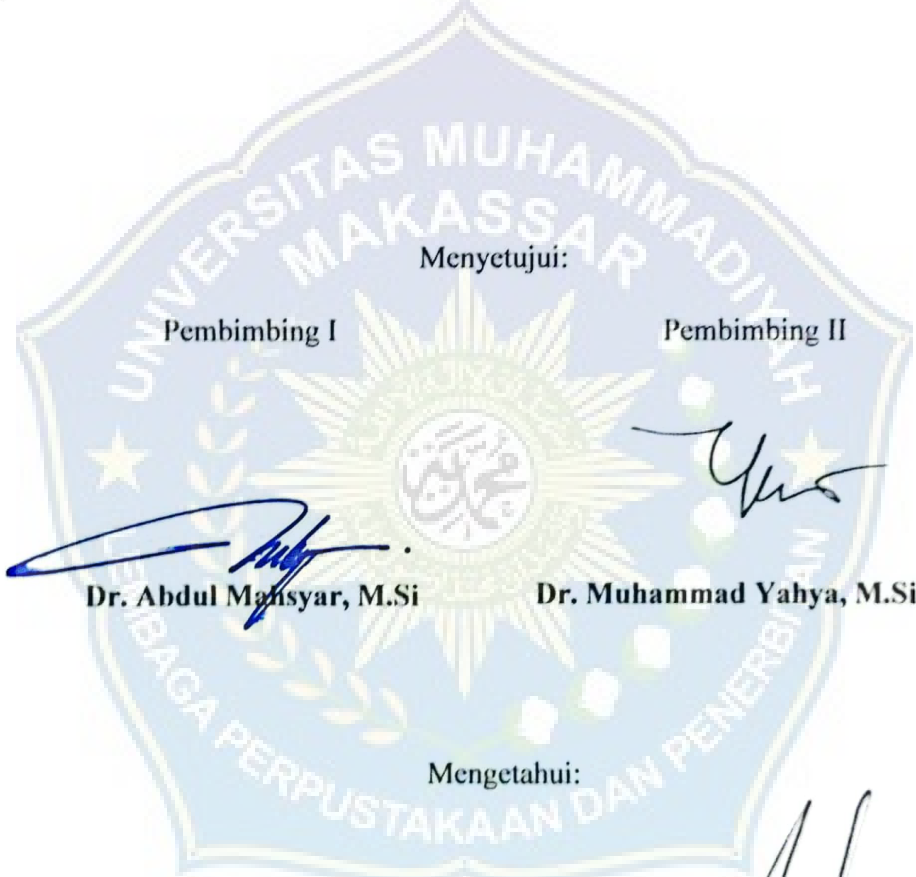
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

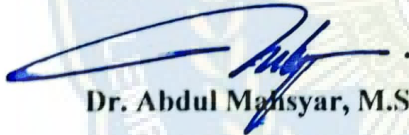
Judul Skripsi : Collaborative Governance Pemberdayaan Petani
Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah
Provinsi Sulawesi Barat
Nama Mahasiswa : Aryanti Puji Arlian
Nomor Induk Mahasiswa : 105641103520
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

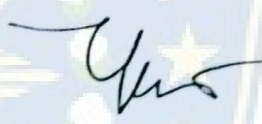


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

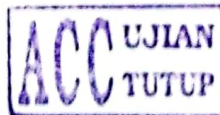
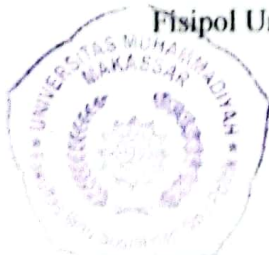

Dr. Abdul Mansyar, M.Si


Dr. Muhammad Yahya, M.Si

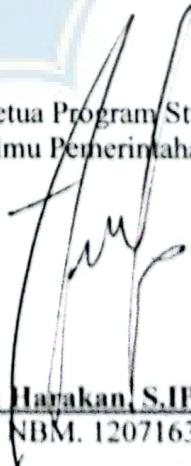
Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207163

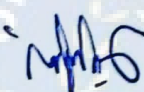
HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 0257/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari selasa, tanggal 07 Mei 2024.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM. 730727

NBM. 992797

Tim Penguji:

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
2. Dr. Muhammad Yahya, M.Si
3. Hamrun, S. IP., M.Si

)
)
)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aryanti Puji Arlian

Nomor Induk Mahasiswa : 105641103520

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Collaborative Governance Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat” adalah karya ilmiah penelitian saya sendiri tanpa melakukan plagiat dari karya orang lain. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran saya siap menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya.

Makassar, 12 September 2023

Yang Menyatakan

Aryanti Puji Arlian

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puja dan puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan dan karunia-Nya yang tidak ternilai sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, menjadi syarat dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) di program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Collaborative Governance Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit DiMamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat”. Tak lupa juga sholawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga tutur kata dan tindakannya senantiasa menjadi cerminan penulis dalam menjalani kehidupan.

Penulis juga sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya keterlibatan beberapa pihak, terutama pembimbing I dan II oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si dan bapak Dr. Muhammad Yahya, M.Si.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Nurkhaerah, S.IP., M.IP selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Seluruh aparat Dinas Pertanian, manager di PT Astra Agro Lestari, dan informan penelitian yang bersedia memberikan data yang di butuhkan sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar.
5. Teristimewa Ayahanda Hariyo Puji Baroto dan Ibunda Suparyanti yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang menjadi semangat bagi penulis. Kupersembahkan karyaku ini untuk ayah dan ibuku tersayang yang mendidik dan membimbingku tanpa batas ruang dan waktu.
6. Untuk saudara-saudariku Gufran, Putri, Mila, Ira, Fitri, Intan, Mira, Pipit, Puput, Risda yang senantiasa menjadi *support system* serta memberikan doa, bantuan dan selalu kebersamai penuh selama proses kuliah hingga selesai.
7. Terakhir, terimakasih kepada diriku sendiri Aryanti Puji Arlian yang sudah menyelesaikan studi ini sampai selesai, sampai sudah meraih gelar sarjana dan terimakasih sudah kuat dan sudah bertahan sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidaklah sempurna, dan belumlah berkualitas sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi peningkatan kapasitas dan pemetaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan cakrawala berfikir setiap orang, serta menjadi sumbangsih bagi bangsa dan negara. Aamiin

*Billahi Fii Sabillihq Fastabiqul Khairat, Wassalamu Alaikum
Warahmutallahi Wabarakatuh*

Makassar 2024

Penyusun

Aryanti Puji Arlian

Nim: 105641103520



ABSTRAK

ARYANTI PUJI ARLIAN, 2024. Collaborative Governance Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. (dibimbing oleh Dr. Abdul Mahsyar, M.Si dan Dr. Muhammad Yahya, M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaboratif Pemerintah Daerah dengan PT Astra Agro Lestari dalam pemberdayaan petani kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data melalui reduksi data, display data dan verifikasi data.

Kolaboratif antara pemerintah dan PT Astra Agro Lestari di Kabupaten Mamuju Tengah ini dalam upaya pemberdayaan petani kelapa sawit sangatlah baik dimana kolaboratif ini dapat meningkatkan produksi kelapa sawit sehingga petani bisa sejahtera dan meningkatnya taraf hidup. Kolaboratif ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bisa memperluas lapangan pekerjaan.

Manfaat dan dampak dari kolaboratif ini yaitu:

- 1) Mampu menyejahterakan petani kelapa sawit.
- 2) Memberikan dampak yang positif seperti peningkatan produksi kelapa sawit.
- 3) Memperluas lapangan pekerjaan.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN UJIAN AKHIR	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teoritis/Kontekstual	11
3. Pemberdayaan Masyarakat	16
C. Kerangka Pikir	21
D. Fokus Penelitian.....	24
E. Deskripsi fokus penelitian.....	25
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	27
C. Informan.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Pengabsahan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV	33
HASIL DAN PEMBAHASAN	33

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	33
B. Hasil Penelitian	42
C. Pembahasan.....	52
BAB V.....	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	63
DOKUMENTASI	64



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Informan.....	29
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah Berdasarkan Kecamatan	34
Tabel 4. 2 Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Mamuju Tengah.....	36
Tabel 4. 3 Jumlah Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Penelitian Terdahulu Menggunakan Aplikasi VOSviewer	9
Gambar 2. 2 Kerangka Pikir	23
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Mamuju Tengah	35
Gambar 4. 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan industri kelapa sawit Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara, terutama melalui ekspor dan lapangan kerja (Firman Hdranto, 2021). Pada tahun 2017, Indonesia mengekspor 31 juta ton minyak sawit dan memperoleh devisa hampir 23 miliar USD (317 triliun Rupee), yang merupakan 13% dari total nilai ekspor Indonesia. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan kontribusi ekspor migas yang hanya menyumbang 9% senilai US\$15,7 miliar (Rp 217 triliun). Sepanjang tahun 2020, ekspor sektor pertanian dan industri Indonesia diperkirakan tumbuh positif masing-masing sebesar 14% dan 2,94% (Ubaidillah, 2021).

Namun terdapat berbagai isu terkait dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh industri seperti arus urbanisasi, pencemaran lingkungan, adanya konsumerisme, semakin sedikit lahan pertanian, cara hidup masyarakat berubah, Limbah industri menyebabkan pencemaran tanah, perubahan mata pencaharian. Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan tersebut adalah kemitraan antara pemerintah dan swasta dengan tujuan memberdayakan petani kelapa sawit skala kecil (Ridwan, 2016).

Sangat penting untuk mendorong pemuda untuk belajar tentang lingkungan dan mendorong mereka untuk memprioritaskan pembangunan

pedesaan dan praktik berkelanjutan jika kita ingin memperlambat proses urbanisasi di daerah-daerah ini(Muhammad yahya, 2023).

Karena keterbatasan sumber daya seperti pengelolaan dana konstruksi dan pemeliharaan, fasilitas, dan staf, pemerintah Kota Makassar mengizinkan sektor swasta untuk mengelola aset publiknya. Dengan kolaborasi sektor swasta, pengembangan aset publik dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan anggaran pemerintah daerah yang lebih sedikit. Untuk mengelola aset publik di Bidang Karebosi, Walikota Makassar bekerja sama dengan perusahaan swasta melalui model kontrak keluar yang dikenal sebagai BGS (Guna Bangun Serah). Masing-masing pihak dalam modus kerjasama ini memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak. Pemkot dapat menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan menghindari biaya pengelolaan dan pemeliharaan lahan, ruang publik yang nyaman, dan area hijau di pusat kota.(Mahsyar, 2015)

Output minyak sawit Indonesia yang tinggi mencapai 32,18 juta ton pada tahun 2017 dan meningkat sekitar 8% pada tahun 2018 menjadi 34,71 juta ton. Sebab, kebutuhan minyak sawit setiap tahunnya sangat tinggi, jika persoalan limbah tidak diperhitungkan. Jika ditanggapi dengan serius, produksi minyak sawit menghasilkan limbah dalam jumlah besar, yang kemudian dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius(Syamriati, 2021).

Pemerintahan sebuah negara menentukan apakah dia maju atau berkembang. Pemerintah meminta untuk dapat beradaptasi dengan apa yang

diperlukan lingkungannya. Dalam upaya untuk mencapai pemerintahan yang efektif diperlukan tindakan perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu pendekatan baru yang muncul dalam kekuasaan saat ini, yaitu *Collaborative Governance* dalam Kerjasama administrasi atau kerja sama Pemerintahan muncul sebagai upaya kerja sama antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemerintahan dalam penanganan masalah masyarakat. Kerja sama yang dimaksudnya adalah antara pemangku pentingnya pemerintah, swasta, dan publik.(Fatimah et al., 2021)

Indonesia merupakan negara agraris yang menghasilkan segala jenis buah-buahan. Salah satunya produksi kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit banyak ditanam oleh perusahaan-perusahaan besar baik pemerintah maupun swasta. Faktanya, banyak masyarakat yang menanam kelapa sawit dalam skala kecil. Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan output sekitar 51,6 juta ton pada tahun 2020. Sekitar 45% dari total produksi minyak sawit. Minyak sawit di Indonesia diproduksi oleh petani kecil atau masyarakat dengan pendapatan lebih sedikit sumber daya lebih dari 50 hektar lahan (Ayu 2020).

Pohon kelapa sawit sangat cocok dibudidayakan di Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin pasar produk pertanian. Peluang dan prospek pasar agroindustri masih sangat terbuka, tergantung bagaimana kita memanfaatkan dan memanfaatkannya.

Tentu saja pertumbuhan pertanian kelapa sawit menjadi salah satu industri yang dapat diandalkan untuk membantu pemerintah mengurangi kemiskinan di Indonesia (Ayu 2020).

Permasalahan pemberdayaan di Mamuju tengah, seperti halnya di banyak wilayah lainnya, dapat dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang perlu ditangani untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa permasalahan terkait pemberdayaan di balai Mamuju antara lain: Kemiskinan, terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, ketahanan pangan dan pertanian, infrastruktur dan terbatasnya akses terhadap sumber daya dasar, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, permasalahan lingkungan hidup, ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, kurangnya modal dan sumber daya, isu sosial. Konflik dan ketegangan (La Ode 2020).

Permasalahan industri kelapa sawit di Mamuju Tengah adalah produksi CPO turun 3% sejak 2021 hingga Januari 2022, jauh lebih rendah dibandingkan penurunan musiman tahun lalu pada Desember 2020 hingga Januari 2021 yang mencapai 7% (Dedi 2022).

Semakin maraknya pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat Indonesia juga terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju Tengah. Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu kecamatan Tobadak, Budong-Budong, Topoyo, Karossa dan Pangale. Masyarakat merasa termotivasi dengan perkebunan yang menjanjikan ini. Ketika perekonomian terus

meningkat pesat dan harga minyak sawit yang kompetitif terus meningkat, komunitas petani bersaing untuk mendapatkan lahan pertanian terbuka. Keadaan ini masih terjadi tanpa mempertimbangkan penggunaan lahan sesuai daya dukungnya (Merlien. 2020).

Kerjasama Pemprov Mamuju Tengah dengan beberapa perusahaan di Mamuju Tengah seperti PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan PT. Astra Agro Lestari bertujuan untuk meningkatkan produksi kelapa sawit. PT. Astra Agro Lestari Tbk atau Astra Agro (Perusahaan) didirikan pada tahun 1988 dan bergerak di bidang budidaya kelapa sawit serta menjalankan banyak kegiatan usaha lainnya. Pemerintah daerah dan PT Astra Agro Lestari telah menjalin kerjasama program pemberdayaan produsen kelapa sawit di beberapa kecamatan pusat Kabupaten Mamuju melalui program Plasma (Maria 2020).

Program Plasma akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan perekonomian daerah. PT. Astra Agro Lestari menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan memberikan dukungan sosial berupa dukungan pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah secara umum (Maria 2020).

Kabupaten Tobadak mempunyai luas wilayah 541,87 km² yang meliputi 8 desa yaitu: Desa Sulobaja, Desa Sejati, Desa Mahahe, Desa Polongaan, Desa Bambadaru, Desa Tobadak, Desa Batu Parigi dan Desa Saloadak. Ibu kota kabupaten Tobadak terletak di desa Mahahe. Desa

terjauh dari ibu kota kabupaten Tobadak adalah Desa Sejati yang berjarak 20,2 km. Perbandingan pendapatan petani mandiri dan produsen plasma di Desa Mahahe Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju. Pendapatan yang diterima petani mandiri sebesar Rp26.334.285,00 dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp1.316.714,00. Sedangkan kegiatan usahatani petani plasma menghabiskan biaya sebesar Rp22.397.652,00/bulan dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp1.119.883,00. Dari selisih pendapatan budidaya kelapa sawit sebesar Rp3.936.633,00, petani lebih memilih menggunakan sistem mandiri (Munawar, 2018).

Kecamatan Budong-Budong merupakan salah satu daerah yang berpotensi untuk pengembangan produksi kelapa sawit karena letaknya yang tinggi dan iklim dengan curah hujan yang stabil, sangat cocok untuk budidaya tanaman kelapa sawit. Varietas kelapa sawit yang ditanam di Kabupaten Budong-budong adalah Pisifera dan Tenera. Menurut data yang ada di BPS Kabupaten Mamuju, pada tahun 2013 produksi kelapa sawit sebesar 566.331,86 ton dan meningkat hingga tahun 2017 menjadi 186.209.762 ton (Sinta 2020).

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh produsen kelapa sawit adalah harganya yang masih jauh dari kesejahteraan masyarakat, karena sebanyak apapun minyak sawit yang dihasilkan, jika buah segar (TBS) rendah maka masyarakat produsen kelapa sawit tidak akan mampu. puas. Jauh dari dukungan sosial, negara selalu menjamin pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya masyarakat produsen kelapa sawit

dalam meningkatkan dan mengelola produksi kelapa sawit, biasanya menyelenggarakan Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pasca panen. Bulan lalu, meningkatkan produksi kelapa sawit dari petani kecil. Kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan produksi kelapa sawit skala kecil (Muhlis. 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dihidirkan maka untuk menjawab beberapa pertanyaan maka peneliti menghadirkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan PT Astra Agro Lestari dalam pemberdayaan petani kelapa sawit Di Mamuju Tengah?
2. Apa saja manfaat dan dampak positif dari kolaboratif Pemerintah dan Swasta bagi petani kelapa sawit dan masyarakat sekitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dihidirkan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Menganalisis pelaksanaan kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan PT Astra Agro Lestari dalam pemberdayaan petani kelapa sawit di Mamuju Tengah.
2. Mengidentifikasi manfaat yang diperoleh oleh petani kelapa sawit dan masyarakat sekitar melalui kolaboratif Pemerintah dan Swasta ini.

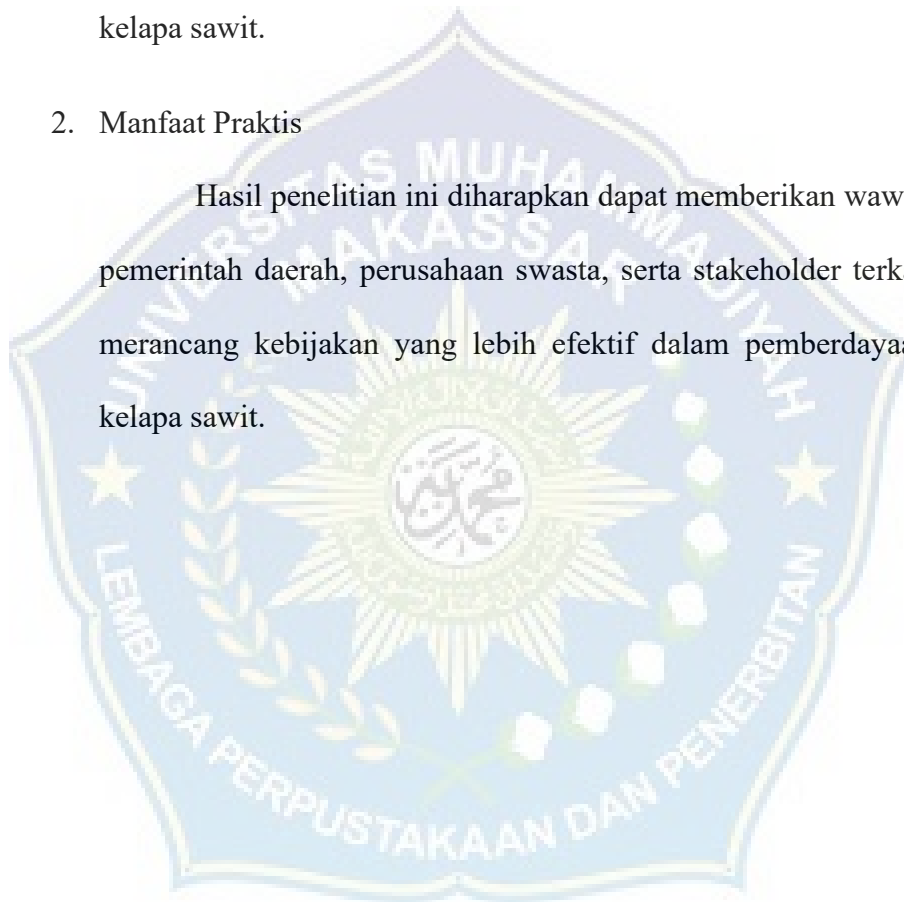
D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang peran kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pemberdayaan sektor pertanian, khususnya petani kelapa sawit.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah, perusahaan swasta, serta stakeholder terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam pemberdayaan petani kelapa sawit.



Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan *publish or perish* di temukan 45 Artikel jurnal pada rentang waktu 2013-2023 yang berkaitan erat dengan kata kunci *colaborative governance* (Zainuddin, 2022), pemberdayaan petani kelapa sawit (Tampubolon, 2021).

Artikel artikel tersebut kemudian dikelola menggunakan *Vosviewer* untuk menentukan posisi proyek penelitian penelitian. Dari hasil olahan data *Vosviewer* ditemukan 11 Poin utama yang menjadi topik penelitian dari peneliti terdahulu. Diantaranya penelitian tentang *Colaborative Governance* Model tata kelola koperasi Likupang dalam pengembangan pariwisata menitikberatkan pada proses kolaboratif sebagai inti kemitraan. Cara kerja sama berlangsung, siapa pesertanya, pembagian tugas dan wewenang, serta prosedur pemantauan, evaluasi dan pelaporan harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Legitimasi kelembagaan dapat memperjelas pembagian tugas sehingga masing-masing pihak berkontribusi terhadap tercapainya tujuan kemitraan (Patadjenu, 2023) terdapat juga penelitian yang membahas pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberdayaan petani kelapa sawit (Wicaksono, 2019). Terdapat juga penelitian yang membahas urgensi kebijakan pemberdayaan petani kelapa sawit (Sayuti, 2020).

Dalam visualisasi *Vosviewer* dapat dilihat dari lokasi yang telah melakukan penelitian mengenai implementasi pemberdayaan petani kelapa sawit (Riadi, 2023).

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di rencanakan terdapat dalam *colaborative governance* pada peneltian terdahulu lebih terfokus pada analisis faktor-faktor yang menghambat penerapan *colaborative governance* (Srikandi & Ubaidullah, 2019). sementara penelitian yang direncanakan berfokus pada Bagaimana *Colaborative governance* dalam perspektif pemberdayaan masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang direncanakan sebelumnya terletak pada teori *colaborative governance* (Safardan, 2023).

B. Tinjauan Teoritis/Kontekstual

1. Pengertian Kolaboratif Governance

Istilah tata kelola kolaboratif adalah suatu bentuk pengelolaan pemerintahan yang melibatkan partisipasi langsung pemangku kepentingan di luar pemerintah atau negara, yang mengarah pada konsensus dan pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan atau pelaksanaan kebijakan dan program publik (Ni Luh 2019).

Tata kelola kolaboratif dapat dianggap sebagai salah satu jenis tata kelola. Konsep ini menekankan pentingnya kondisi di mana aktor publik dan swasta (bisnis) bekerja sama dalam cara dan proses tertentu untuk menciptakan undang-undang, peraturan dan perundang-undangan, buku-buku yang relevan dengan publik atau masyarakat. Pemahaman ini muncul di pemerintahan. Aktor publik, yaitu negara, dan aktor swasta, yaitu organisasi profesi atau dunia usaha, bukanlah

entitas yang terpisah dan berfungsi secara independen, melainkan bekerja sama untuk kepentingan masyarakat (Uma 2022).

2. Konsep Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan gabungan dari dua konsep yaitu kolaborasi dan tata kelola. Kolaborasi berarti bekerja sama, melaksanakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama melampaui batas-batas hubungan multisektoral, dan dalam melaksanakan kerja sama tersebut, tata kelola adalah suatu sistem pemerintahan. Oleh karena itu, tata kelola kolaboratif adalah sistem pemerintahan yang menggunakan metode kolaboratif yang melibatkan aktor negara dan non-negara yang bekerja di berbagai sektor untuk mencapai tujuan bersama (Appel 2015).

Pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas internalnya untuk melaksanakan kebijakan dan program. Keterbatasan kapasitas, sumber daya, dan jaringan menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, sehingga mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah lain, sektor swasta dan masyarakat, individu, masyarakat, dan masyarakat sipil. Dari sana, kerjasama dapat dibangun untuk mencapai tujuan program atau kebijakan. Secara umum dijelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan suatu proses dimana pemangku kepentingan yang berbeda berpartisipasi untuk meningkatkan kepentingan masing-masing organisasi dalam mencapai tujuan bersama (Ranggi 2016).

a. Indikator Colaborative Goverenance

Teori menurut Ansell and Gash

1. *Face-to-Face Dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Kolaborasi dibangun melalui dialog langsung antar pemangku kepentingan. Karena kerja sama itu sendiri didasarkan pada konsensus, maka diperlukan komunikasi mendalam atau dialog langsung untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan bersama. Tahap ini lebih dari sekedar negosiasi karena melibatkan banyak masalah komunikasi yang berbeda. Nantinya hal ini akan mempengaruhi kepercayaan, minat, saling pengertian dan komitmen dalam proses kerjasama itu sendiri.

2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Terbentuknya kepercayaan antar subjek tidak ada bedanya dengan langkah awal dialog langsung. Namun, seorang pemimpin yang baik harus mampu memahami pentingnya kepercayaan antar pihak sebelum memanipulasi keadaan. Lebih lanjut, jika terdapat sejarah ketidakharmonisan antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka membangun kepercayaan antar pihak akan menjadi faktor penentu dalam kerjasama.

3. *Commitment To The Process* (Komitmen Terhadap Proses)

Komitmen dikaitkan dengan keberhasilan kerjasama, komitmen merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi untuk berpartisipasi dalam kerjasama. Dikatakan bahwa terkadang

pemangku kepentingan berpartisipasi karena mereka mempunyai kepentingannya sendiri. Misalnya agar kepentingan mereka tidak terabaikan, untuk menjamin kedudukannya atau untuk menghormati hukum. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat harus ikut serta dalam proses yang sama, yaitu negosiasi merupakan cara terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Langkah selanjutnya adalah berbagi pemahaman. Seiring dengan berlanjutnya kolaborasi, para pemangku kepentingan harus mengembangkan kesadaran serupa. Yang kami maksud dengan kesamaan pemahaman di sini adalah misi yang sama, tujuan yang sama, tujuan yang sama dan ideologi yang sama.

5. *Intermediate Outcomes* (Hasil Antara)

Langkah lain dalam proses kolaboratif berkaitan dengan hasil antara. Kerja sama dapat tercapai jika tujuan kerja sama tercapai, manfaat kerja sama jelas, dan keuntungan yang diperoleh kecil atau minimal. Kemenangan kecil yang terjadi dapat dilihat sebagai tanda keberhasilan kemitraan dan juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemitraan. Tentu saja, meskipun manfaatnya kecil, para pemangku kepentingan akan menganggap kerja sama ini bermanfaat (Ariesmansyah, 2023).

b. Prinsip Colaborative Governance

Kolaborasi berarti partisipasi semua pihak dalam upaya bersama untuk memecahkan suatu masalah. Dalam pemecahan masalah secara interaktif diperlukan adanya kerjasama yang ditandai dengan adanya tujuan bersama. Kolaborasi juga berguna dalam mengendalikan proses manufaktur yang dipilih untuk memenuhi harapan tertentu. Ada 5 prinsip yang diterapkan dalam kegiatan koperasi, antara lain:

- 1) Gabung, tautkan dengan keterlibatan mental dan emosional atau secara fisik untuk bertemu kegiatan dilaksanakan dan didukung mencapai tujuan dan bertanggung jawab.
- 2) Dapat diterima, kira-kira jaminan atau bukti kinerja kerja sama.
- 3) Komunikasi, kualitas Komunikasi pemerintah sangat penting untuk publik. Oleh karena itu pemerintah harus berpartisipasi langsung dalam proses pertukaran informasi tentang kebijakan, ide, atau gagasan dan keputusan antar pemerintah maupun pihak terkait.
- 4) Percaya diri, bangun rasa percaya diri komunikasi antara para pihak tidak dapat dipisahkan permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat.
- 5) proses kerja sama.
- 6) Berbagi dengan sikap saling pengertian dengan melakukan sesuatu bekerja dan bekerja sama untuk tujuan bersama dapat meraih (Ariesmansyah, 2023).

3. Pemberdayaan Masyarakat

Suatu proses harus efektif untuk mengubah masyarakat menuju situasi kehidupan yang lebih baik. Meningkatkan peluang, kesiapan/motivasi dan akses masyarakat terhadap sumber daya, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk menentukan sendiri masa depan mereka dengan berpartisipasi dalam mendefinisikan dan menciptakan kualitas hidup masyarakat (Endah, 2020).

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan akibat dari kegagalan konsep-konsep pembangunan yang sebelumnya diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru dan diterapkan di negara-negara berkembang lainnya di Asia. Konsep pembangunan yang dianut model ekonomi neoklasik yang menekankan industrialisasi dan mekanisme trickle down ini terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan, sehingga tidak berjalan sesuai harapan. seharusnya seperti itu (Arleha 2021).

a. Prinsip Pemberdayaan

Aspek penting yang perlu dibahas dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana prinsip-prinsip pemberdayaan yang terkait dengan permasalahan pembangunan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pemberdayaan secara efektif dan komprehensif untuk mencapai tujuan di atas. Tujuan ini dapat dicapai dengan memberdayakan kelompok yang dianggap sangat rentan terhadap

masalah kemiskinan. Berkolaborasi dan berpartisipasi dengan menggunakan metode yang tepat, demokratis, berorientasi dan profesional (Haris, 2014). Berikut beberapa prinsip pemberdayaan:

- 1) Pemberdayaan merupakan proses kolaboratif. Karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai mitra.
- 2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai otoritas atau otoritas dengan akses terhadap sumber daya dan peluang.
- 3) Masyarakat harus melihat dirinya sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- 4) Keterampilan diperoleh atau dikembangkan melalui pengalaman hidup, terutama yang memberikan rasa kompetensi sosial. Media sosial informal merupakan sumber dukungan penting untuk mengurangi stres dan meningkatkan kapasitas dan kendali seseorang.
- 5) Setiap orang harus berpartisipasi dalam proses pemberdayaan diri
- 6) Sarana dan hasil harus dibentuk sendiri.
- 7) Tingkat kesadaran adalah kunci pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan untuk perubahan.
- 8) Pemberdayaan melibatkan akses ke sumber daya dan kemampuan untuk menggunakannya secara efektif.
- 9) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sintetik, terus berkembang, berevolusi masalah selalu memiliki solusi yang beragam.

10) Pemberdayaan dicapai melalui paralelisme struktur pribadi dan pembangunan ekonomi (Haris, 2014).

b. Indikator Pemberdayaan

1. *Enabling* (Membuat Mampu) Manajer dalam ketrampilan ini akan berusaha memastikan bahwa karyawan mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk diberdayakan dan cukup mempunyai kepercayaan diri untuk berani menghadapi tuntutan baru akibat pemberdayaan dan akibat kesempatan-kesempatan yang diberikan. Bentuk perilakunya pemimpin memberikan nasehat dan dorongan kepada karyawan memiliki segala kecakapan dan pengetahuan untuk menjalankan pemberdayaan agar dapat menjadi anggota tim yang efektif.
2. *Facilitating* (Memfasilitasi) Manajer memandang tugas pokok manajemen untuk meniadakan segala halangan, rintangan dan penundaan yang akan menghalangi karyawan untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya.
3. *Consulting* (Berkonsultasi) Manajer ingin menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk memanfaatkannya. Berarti bahwa manajer perlu melakukan konsultasi dengan karyawan akan penggunaan pengetahuan dan pengalamannya.
4. *Collaborating* (Bekerja Sama) Manajer perlu bekerja sama dengan karyawan dalam melakukan pemberdayaan yaitu. Kerja sama yang bebas, terbuka yang memenuhi seluruh kecakapan, kekayaan dan

pengetahuan dalam organisasi yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi.

5. *Mentoring* (Membimbing) Manajer bertindak sebagai teladan dan pelatih bagi karyawan serta rekan-rekan kerja. Membimbing lebih luas dari pendelegasian. Membimbing sangat fundamental bagi proses pemberdayaan.

6. *Supporting* (Mendukung) Manajer perlu memberikan dukungan pada karyawan dan membantu mereka untuk mandiri. Pemberdayaan akan muncul bila manajer melihat bahwa peran utama mereka adalah memberikan dukungan yang tepat jauh lebih utama dari peran kepemimpinan tradisional (Adiawati 2020).

4. Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat

a. Provinsi Sulawesi Barat (Yuda, 2022):

1) Konteks geografis. Provinsi Sulawesi Barat terletak di bagian barat Pulau Sulawesi, Indonesia. Wilayah ini memiliki garis pantai yang panjang dan sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan serta hutan hujan tropis yang kaya akan sumber daya alam.

2) Karakteristik ekonomi. Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian dan perkebunan, dimana produksi kelapa sawit merupakan salah satu industri utamanya. Selain itu, industri pariwisata juga semakin berkembang di kawasan ini.

- 3) Karakteristik sosial. Sulawesi Barat kaya akan keberagaman suku dan budaya. Masyarakatnya mencakup banyak suku yang berbeda, seperti Bugis, Makassar, Mandar, Jawa dan banyak lainnya. Hal ini menciptakan lanskap sosial yang beragam dengan budaya yang berbeda.
- 4) Karakteristik politik. Secara politis, Provinsi Sulawesi Barat memiliki pemerintahan provinsi yang berperan penting dalam pengaturan sektor pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan terkait kelapa sawit.

b. Kabupaten Mamuju Tengah (Yuda, 2022):

- 1) Konteks geografis. Pusat Kabupaten Mamuju terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah ini dapat mencakup kondisi geografis yang berbeda, termasuk dataran, wilayah pegunungan, dan wilayah pesisir, bergantung pada lokasi geografis.
- 2) Karakteristik ekonomi. Perekonomian pemerintah pusat Mamuju erat kaitannya dengan sektor pertanian, khususnya produksi kelapa sawit. Pertanian dan perkebunan merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat di daerah ini.
- 3) Karakteristik sosial. Pemerintah pusat Mamuju juga memperlihatkan keberagaman suku dan budaya. Masyarakat setempat menjalin hubungan erat dengan

industri pertanian, khususnya produsen kelapa sawit. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertanian merupakan elemen penting dalam konteks pemberdayaan.

- 4) Karakteristik politik. Aspek politik pemerintah pusat Mamuju juga berperan dalam pengaturan dan pengawasan sektor pertanian, termasuk kegiatan kerjasama antara pemerintah, produsen kelapa sawit, dan masyarakat petani. Dalam penelitian Anda tentang tata kelola kolaboratif dan pemberdayaan produsen kelapa sawit di wilayah Mamuju tengah, penting untuk memahami konteks geografis, ekonomi, sosial dan politik karena hal ini akan mempengaruhi dinamika kerja sama, serta tantangan dan peluang. yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. program atau kebijakan pemberdayaan.

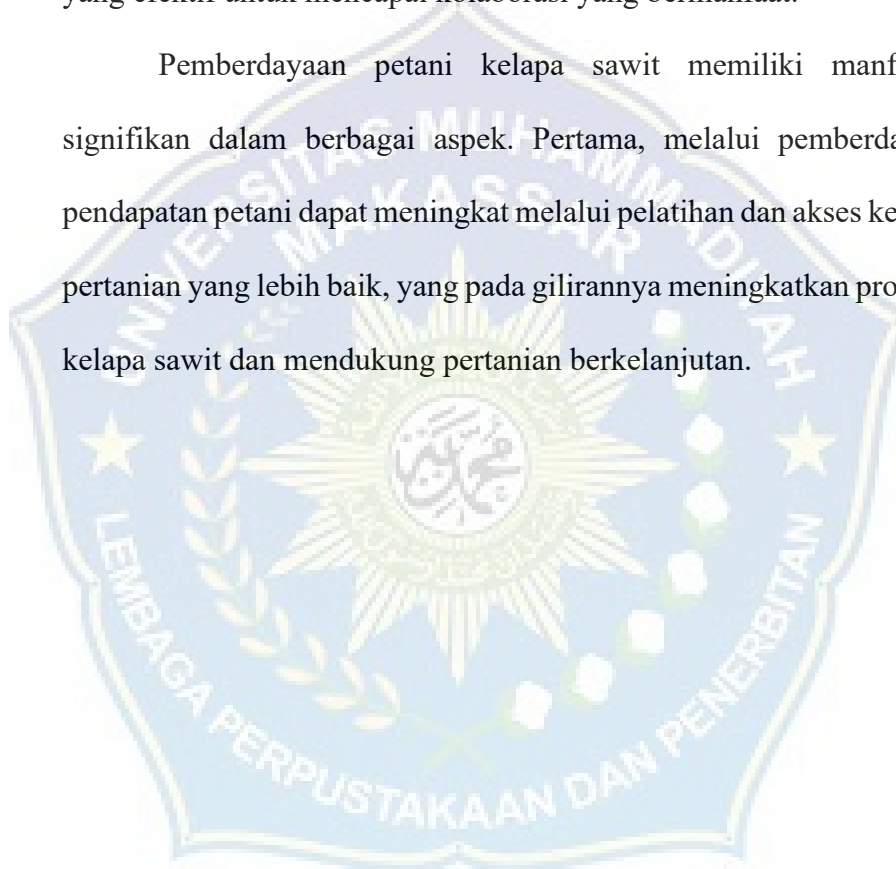
C. Kerangka Pikir

Collaborative governance dianggap sebagai solusi penting dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Dalam kerangka ini, kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan program-program yang efisien dan efektif, yang didasarkan pada pemahaman masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

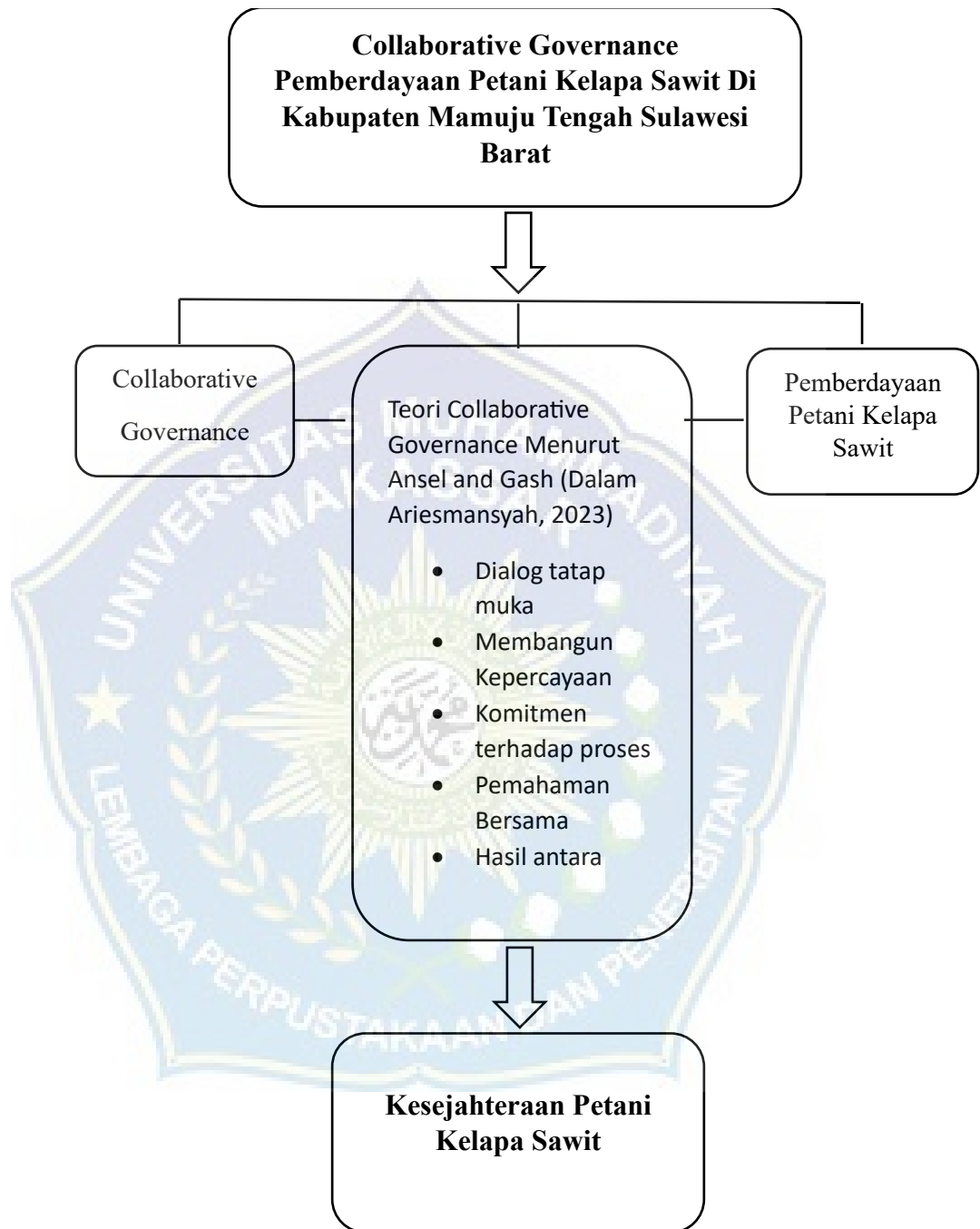
Kolaborasi dalam *collaborative governance* dimulai dengan komunikasi yang mendalam melalui dialog tatap muka. Kepercayaan dan

komitmen menjadi faktor kunci dalam proses ini, dan pemangku kepentingan harus terlibat secara aktif. Negosiasi juga diperlukan untuk memotivasi pihak-pihak yang terlibat. Kesuksesan kolaborasi ditentukan oleh pemahaman bersama dan pencapaian kemenangan kecil yang meningkatkan kerjasama. Langkah-langkah ini membentuk kerangka kerja yang efektif untuk mencapai kolaborasi yang bermanfaat.

Pemberdayaan petani kelapa sawit memiliki manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek. Pertama, melalui pemberdayaan ini, pendapatan petani dapat meningkat melalui pelatihan dan akses ke teknologi pertanian yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas kelapa sawit dan mendukung pertanian berkelanjutan.



Gambar 2. 2 Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Dari beberapa literatur diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kolaborasi antara Pemerintah Mamuju Tengah dengan swasta dalam hal ini PT Astra Agro Lestari pada kecamatan Budong-budong dengan model petani plasma karena melihat kolaborasi pemerintah dengan PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri yang ketika melihat data diatas itu tergolong gagal karena tidak mampu mengangkat pendapatan petani kelapa sawit yang masuk dalam program petani plasma, justru ketika di bandingkan dengan petani mandiri tergolong lebih diatas dari sisi pendapatan.

Dari beberapa literatur diatas, peneliti tertarik untuk meneliti Dampak Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit Terhadap Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat penelitian ini akan memeriksa secara mendalam bagaimana pertumbuhan industri kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah telah memengaruhi ekonomi daerah dan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Ini mencakup analisis kontribusi industri kelapa sawit terhadap perekonomian, perubahan sosial seperti urbanisasi dan perubahan mata pencaharian, serta masalah pencemaran lingkungan yang mungkin muncul. Penelitian ini juga dapat melibatkan evaluasi efektivitas program kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam memberdayakan petani kelapa sawit skala kecil di daerah tersebut.

E. Deskripsi fokus penelitian

Deskripsi fokus yang dibangun dalam penelitian maka yang menjadi gambaran pada penelitian yaitu:

1. Kolaborasi pemerintahan meliputi:

Berikut adalah teks yang telah disederhanakan:

- a) Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*) Dialog ini penting karena kolaborasi bergantung pada kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Swasta ini. Pemerintah dan swasta melakukan kesepakatan bersama seperti membuat pembaharuan-pembaharuan agar lebih mempermudah pekerjaan.
- b) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*) pemimpin yang baik harus mengerti pentingnya kepercayaan sebelum mencoba memengaruhi situasi. Membangun kepercayaan yang dimaksud adalah seperti penetapan harga pada kelapa sawit yang dilakukan oleh pemerintah dan Perusahaan.
- c) Komitmen Terhadap Proses (*Commitment To The Process*) Komitmen berhubungan dengan kesuksesan kerjasama, dan mempengaruhi motivasi pemerintah dan swasta untuk berpartisipasi. Pemerintah disini akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pada Perusahaan.
- d) Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*) Dalam kolaborasi yang berkelanjutan, pemangku kepentingan harus memiliki kesamaan pemahaman tentang misi, tujuan, dan ideologi. Pemerintah dan

Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama agar petani bisa Sejahtera.

- e) Hasil Antara (*Intermediate Outcomes*) Proses kolaborasi juga melibatkan hasil antara. Hasil antara ini adalah pencapaian yang telah berhasil dijalankan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk memberdayakan masyarakat di Mamuju Tengah dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka. Proses ini melibatkan pembangunan peluang, motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam menentukan arah masa depan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri.

- 3. Petani kelapa sawit yang dimaksud adalah masyarakat Mamuju Tengah yang memiliki kebun kelapa sawit.
- 4. Penelitian ini akan mendalami pada konsep *collaborative governance* dalam konteks pemberdayaan petani kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utama adalah menggali praktik-praktik kolaboratif yang terjadi antara pemerintah daerah, industri kelapa sawit, dan komunitas petani sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sektor pertanian kelapa sawit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan mulai dari tanggal 4 Januari s/d 4 Maret 2024. Lokasi penelitian akan berfokus di Kabupaten Mamuju Tengah yaitu di PT Astra Agro Lestari yang terletak di Kecamatan Budong-Budong. Selanjutnya, lokasi penelitian ini di lanjutkan di Dinas Pertanian yang terletak di Kecamatan Topoyo dan di lanjutkan kepada petani kelapa sawit. Sebagai studi kasus untuk menganalisis penerapan Konsep *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya, sehingga tujuan penelitian ini yaitu menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, terperinci, dan tuntas datanya.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami dimana peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta.

C. Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti.

Pada penelitian ini pemilihan informan di dasarkan pada mereka yang betul-betul di anggap memahami permasalahan yang ingin di teliti di lapangan. Informan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 3. 1 Daftar Informan

Nama	Inisial	Jabatan	ket
I Wayan Purnayase, S.P	WP	Ketua Bidang Perkebunan	1
Surya	SY	Manager PT Astra Agro Lestari	1
Hariyo, Misdi	HY, MD	Petani kelapa sawitt	2

D. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data adalah suatu proses induktif dalam mengorganisir data dalam beberapa kategori dan mengidentifikasinya, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai peranan wanita dalam jabatan publik, dan data tersebut disajikan untuk mendukung dalam pengambilan kesimpulan (sugiyono, 2014). Teknik ini yang akan digunakan dalam menghimpun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi adalah melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang akan di teliti yaitu Pemerintah Daerah dan PT Astra Agro Lestari. Observasi yang dilakukan dapat membantu memahami permasalahan yang ada.
2. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dengan pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah, perwakilan dari PT Astra Agro Lestari, dan petani kelapa sawit.

3. Dokumentasi dalam hal ini lebih mengarah pada bukti konkret. Yakni dengan memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, Dimana responden berlokasi atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Dengan instrument ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang mendukung penelitian dan berkaitan dengan topik penulis yaitu mengenai *Collaborative Governance* Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

E. Teknik Pengabsahan Data

Keabsahan data dalam melakukan penelitian merupakan cara untuk mencapai kepercayaan penelitian. Untuk menjaga keabsahan data supaya tetap original menggunakan teknik triangulasi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data yang ada di lapangan dengan objek penelitian. Dalam hal keabsahan data ini supaya mendapatkan informasi secara menyeluruh melalui sumber data (Rukajat, 2018). Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini ialah:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini, untuk menguji kredibilitas data tentang proses pemekaran wilayah maka pengumpulan data pengujian data yang telah diperoleh dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan masyarakat yang menjadi objek.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dengan cara menyusun data kedalam kategori, menguraikan kedalam komponen-komponen, melakukan penggabungan, menyusun kedalam struktur, memilih mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami baik untuk diri sendiri maupun orang lain. (Ernanda, 2017), adapun analisis data menggunakan tiga proses yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan, dokumen, arsip dan sebagainya, sedangkan untuk proses mempertegas, mempersingkat, menghilangkan yang tidak perlu, memilih fokus, dan menyusun data sehingga kesimpulan bisa dibuat.

2. Penyajian Data, seperti menyusun data dan mempersentasikan data dengan baik agar lebih mudah untuk dipahami. Penyajian bisa berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, tabel dan seterusnya.
3. Menarik Kesimpulan atau melakukan verifikasi, proses penarikan kesimpulan awal masih belum kuat, terbuka dan skeptis.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Collaborative Governance Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Serta menjelaskan tentang manfaat dan dampak dari kolaboratif Pemerintah dan Swasta bagi petani kelapa sawit dan masyarakat.

Peneliti akan menguraikan secara singkat gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum lokasi Kabupaten Mamuju Tengah dan gambaran umum objek penelitian yaitu pihak Dinas Pertanian, Perusahaan swasta dan masyarakat.

1. Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Barat. Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang di sahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di Gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Kabupaten Mamuju Tengah dibagi menjadi 5 kecamatan, antara lain Pangale, Budong-Budong, Tobadak, Topoyo dan Karossa. Adapun populasi penduduk adalah sekitar 139.742 jiwa dengan luas wilayah 3.014,37km. Wilayah ini kaya akan keindahan alam termasuk

pegunungan, sungai dan pantai yang menarik. Perekonomian di Kabupaten ini didukung oleh sektor pertanian dan perkebunan. Mayoritas penduduknya memeluk agama islam, sehingga menciptakan keragaman budaya dan kehidupan beragama.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan (Jiwa)					
	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	22	23	22	23	22	23
Pangale	7.424	7.573	7.017	7.152	14.441	14.725
Budong- Budong	15.584	15.863	14.658	15.002	30.242	30.865
Tobadak	15.714	15.668	14.645	14.843	30.359	30.511
Topoyo	18.555	18.886	17.416	17.809	35.971	36.695
Karossa	15.028	15.334	13.723	14.325	29.015	29.659
Kab.Mamuju Tengah	72.965	73.324	67.723	69.131	140.028	142.455

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah

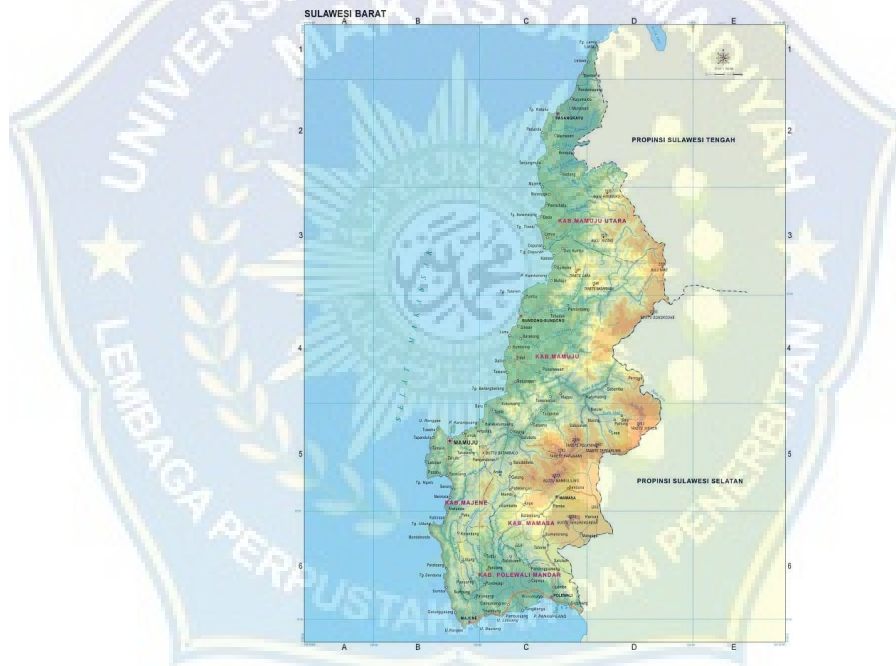
Secara geografis Kabupaten Mamuju Tengah terletak pada bagian barat pulau Sulawesi dan berposisi pada bentangan selat Makassar, yakni 1°47'82"-2°17'31" Lintang Selatan, 119°08'12"-119°24'08" Bujur Timur. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Sungai Benggaulu Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara.

Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Batu Bicara, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Sungai Karama dan Desa Trailu Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.

Sebelah barat: berbatasan dengan selat Makassar.



Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Mamuju Tengah

Sumber: WebSite Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat

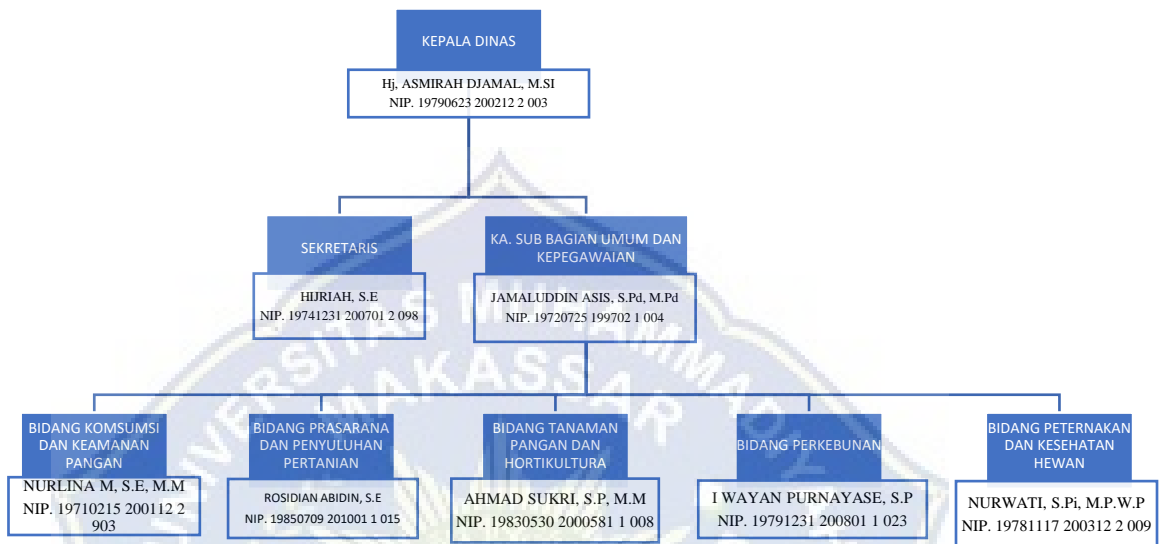
Tabel 4. 2 Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Mamuju Tengah

Kode Komendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa/Kelurahan
76.06.03	Budong-Budong	11	Babana, Barakkang, Bojo, Kire, Lembah, Hada, Lumu, Pasapa, Pontanakayang, Salogatta, Salumanurung, Tinali
76.06.05	Karossa	11	Benggaulu, Kadaila, Kambunong, Karossa, Kayu Calla, Lara, Lembah Hopo, Salubiro, Sanjango, Suka Maju, Tasokko
76.06.02	Pangale	9	Kombiling, Kuo, Lamba-Lamba, Lemo-Lemo,

			Pangale, Polo Camba, Polo Lereng, Polo Pangale, Sartanamaju
76.06.01	Tobadak	8	Bambadaru, Batu Parigi, Mahahe, Palongan, Saloadak, Sejati, Sulobaja, Tobadak
76.06.04	Topoyo	15	Bambamanurung, Budong-Budong, Kabubu, Pangalloang, Paraili, Salulekbo, Salupangkang, Salupangkan IV, Sinabatta, Tabolang, Tangkou, Tappilina, Topoyo, Tumbu, waeputeh
	Total	54	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah

2. Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah



Gambar 4. 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah memiliki tugas sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan pertanian pada Instansi Pemerintah baik di Tingkat pusat maupun daerah. Serta dapat menjadi abdi masyarakat agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam peningkatan produktivitas pertanian. Pemberdayaan petani juga dapat memberikan dukungan kepada petani dalam hal pendidikan, pelatihan dan akses ke sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dinas Pertanian mempunyai peran yang sangat penting sebagai pelaksana teknis, dituntut

memiliki kemampuan manajerial dan wawasan luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Dinas Pertanian juga menyediakan informasi terkini kepada petani terkait teknologi, pasar dan kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan pertanian. Selain itu, mereka memberikan pelatihan dan Pendidikan kepada petani agar dapat mengadopsii teknologi modern dan praktik pertanian yang lebih efisien. Pemantauan kondisi pertanian, evaluasi keberhasilan program-program, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Memastikan adanya infrastruktur yang mendukung seperti irigasi, jalan pertanian dan pasar adalah tanggung jawab dinas pertanian untuk meningkatkan aksesibilitas dan efesiensi. Dinas pertanian juga aktif dalam kegiatan pengawasan terhadap hama dan penyakit tanaman, serta memberikan dukungan teknis dan konsultasi kepada petani untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan hasil pertanian.

Tabel 4. 3 Jumlah Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Petani (KK)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pangale	803	803	803	803	803	803	803
2.	Budong-Budong	4325	4325	4325	4325	4325	4325	4325
3.	Tobadak	5266	5296	5296	5296	5296	5296	5296
4.	Topoyo	3567	3567	3567	3567	3567	3567	3567
5.	Karossa	6217	6217	6217	6217	6217	6217	6217
Jumlah		20178	20208	20208	20208	20208	20208	20208

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah

3. Pt Astra Agro Lestari

PT Astra Agro Lestari Tbk (Perseroan) mulai mengembangkan industry Perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Berawal dari Perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet, hingga tahun 1984, dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau, kini, Perseroan terus berkembang dan saat ini menjadi salah satu Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dengan tata Kelola terbaik dengan luas areal Kelola mencapai 297.011 hektar yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan dan Slawesi.

Dalam mengelola Perkebunan kelapa sawit, sejak awal berdirinya, Perseroan telah membangun Kerjasama dengan Masyarakat dalam bentuk kemitraan intiplasma dan IGA (Income Generating Activity) atau kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat baik melalui budidaya sawit maupun non sawit. Sampai dengan tahun 2016, Perseroan telah bekerjasama dengan 51.709 petani kelapa sawit yang bergabung dalam 2.396 kelompok tani. Kerjasama ini memastikan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit yang di Kelola Perseroan juga memberikan manfaat yang besar bagi Masyarakat sekitar.

Seiring dengan pertumbuhan usaha Perseroan, pada tahun 1997 perseroan melakukan Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (saat itu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya). Pada tahun 2016, Perseroan juga melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) senilai kurang lebih Rp 4 triliun. Dengan langkah-langkah korporasi yang telah dilakukan Perseroan, saat ini kepemilikan saham publik Perseroan mencapai 20,32% dari total 1,92 miliar saham yang beredar. Kepercayaan investor yang tinggi terhadap perdagangan yang berakhir tanggal 30 Desember 2016, harga saham Perseroan dengan kode perdagangan "AALI" ditutup pada posisi Rp 16.775.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha, selain mengelola lahan Perkebunan kelapa sawit, Perseroan juga mengembangkan industri hilir yang terkait. Perseroan telah mengoperasikan pabrik pengolahan minyak sawit (refinery) di Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan di

Dumai, Provinsi Riau. Produk minyak sawit olahan dalam bentuk olein, stearin, dan PFAD ini untuk memenuhi permintaan pasar ekspor antara lain dari Tiongkok dan Filipina. Mulai tahun 2016, Perseroan juga telah mengoperasikan blending plant atau pabrik pencampuran pupuk di Kabupaten Donggala, provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, Perseroan juga mulai mengembangkan usaha integrasi sawit-sapi.

Menghadapi tantangan di masa mendatang, Perseroan memfokuskan strategi usaha pada paya peningkatan produktivitas, meningkatkan efisiensi di semua ini, serta diversifikasi usaha pada sektor-sektor prospektif yang terkait dengan usaha inti di bidang Perkebunan kelapa sawit.

B. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian Collaborative Governance Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk meningkatkan produksi petani kelapa sawit agar masyarakat lebih sejahtera dan mempertegas dalam hal penentuan harga kelapa sawit. Kepala dinas Perkebunan menjelaskan dengan baik bahwa dengan adanya keberadaan Perusahaan di Mamuju Tengah sendiri dapat membantu memenuhi taraf hidup masyarakat dalam konteks kesejahteraan yang berkaitan terhadap pertanian. Kolaboratif yang dilakukan oleh Pemerintah dan Perusahaan ini adalah seperti memberikan pelatihan-pelatihan terhadap petani kelapa sawit tentang bagaimana cara membudidayakan dan merawat

pohon sawit dengan baik. Selain itu pemerintah dan Perusahaan juga memberikan bibit kelapa sawit kepada petani untuk ditanam, dan membangun infrastruktur seperti jalan agar mempermudah petani saat bekerja.

a. Dalam proses mencapai pemberdayaan petani, berikut ini adalah hasil penelitian berdasarkan 5 indikator dari Teori menurut Ansel and Gash

1. *Face-To-Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)*

Kolaborasi dibangun melalui dialog langsung antar pemangku kepentingan. Karena kerja sama itu sendiri didasarkan pada konsensus, maka diperlukan komunikasi mendalam atau dialog langsung untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan bersama. Tahap ini lebih dari sekedar negosiasi karena melibatkan banyak masalah komunikasi yang berbeda. Nantinya hal ini akan mempengaruhi kepercayaan, minat, saling pengertian dan komitmen dalam proses kerjasama itu sendiri. Berikut hasil wawancara bersama manager PT Astra Agro Lestari Bapak Surya mengenai inovasi atau teknologi yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor kelapa sawit di Mamuju Tengah.

“Untuk inovasi terbaru di PT Astra itu sendiri tentu ada apalagi di kebun inti, contohnya seperti dulu masih menggunakan takaran manual seperti sistem tabur dan sekarang sudah menggunakan alat mesin sprayer sehingga menjadi sangat efisien, lebih cepat dan efektif dengan cara seperti itu dapat menambah produktifitas.” (wawancara dengan bapak Surya Kamis 25 Januari 2024).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, dialog tatap muka yang dilakukan oleh Pemerintah dan PT Astra Agro Lestari sangat bermanfaat seperti adanya inovasi yang hadirkan sehingga dapat membantu untuk mengefisiensikan waktu. Yang Dimana dulu masih dilakukan secara manual dan sekarang sudah modern dengan menggunakan mesin.

2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Terbentuknya kepercayaan antar subjek tidak ada bedanya dengan langkah awal dialog langsung. Namun, seorang pemimpin yang baik harus mampu memahami pentingnya kepercayaan antar pihak sebelum memanipulasi keadaan. Lebih lanjut, jika terdapat sejarah ketidakharmonisan antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka membangun kepercayaan antar pihak akan menjadi faktor penentu dalam kerjasama. Berikut hasil wawancara bersama manager PT Astra Agro Lestari Bapak Surya mengenai upaya khusus yang dilakukan untuk membangun pemahaman bersama dan komunikasi terbuka antara Pemerintah Daerah, PT Astra Agro Lestari dan petani kelapa sawit.

“untuk upaya khusus untuk membangun pemahaman bersama dan komunikasi terbuka antara Pemerintah Daerah, PT Astra Agro Lestari dan petani kelapa sawit itu sudah pasti ada seperti penetapan harga pada petani sawit, itu lah yang menjadi sinergitasnya ada pada perwakilan perusahaan, ada perwakilan pemerintahan dinas Perkebunan dan ada petani juga yang di wakili dengan asosiasinya.” (wawancara dengan bapak Surya Kamis 25 Januari 2024).

Dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, untuk membangun kepercayaan bersama adalah upaya khusus yang dilakukan yaitu dengan cara menetapkan harga kelapa sawit pada petani. Aktivitas yang di jalankan secara bersama untuk menerima hasil yang maksimal. Hal ini dilakukan agar dapat menyejahterakan masyarakat terutama pada petani kelapa sawit.

3. *Commitment To The Process* (Komitmen Terhadap Proses)

Komitmen dikaitkan dengan keberhasilan kerjasama, komitmen merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi untuk berpartisipasi dalam kerjasama. Dikatakan bahwa terkadang pemangku kepentingan berpartisipasi karena mereka mempunyai kepentingannya sendiri. Misalnya agar kepentingan mereka tidak terabaikan, untuk menjamin kedudukannya atau untuk menghormati hukum. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat harus ikut serta dalam proses yang sama, yaitu negosiasi merupakan cara terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan. Berikut hasil wawancara bersama manager PT Astra Agro Lestari Bapak Surya mengenai evaluasi rutin atau mekanisme penilaian kinerja yang digunakan untuk memastikan bahwa tujuan kolaboratif ini tercapai dengan baik.

“Ada evaluasi rutin atau mekanisme penilaian kinerja yang memastikan bahwa tujuan kolaboratif ini tercapai dengan baik. Indikatornya itu biasanya dinas Perkebunan yang datang untuk melakukan pengecekan-pengecekan misalnya seperti ada kendala pada produksi kelapa sawit.” (wawancara dengan bapak Surya Kamis 25 Januari 2024).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, komitmen terhadap proses itu terdapat evaluasi rutin yang dilakukan oleh dinas Perkebunan terkait mekanisme kinerja pada Perusahaan. Dinas Perkebunan akan datang untuk mengecek apakah produksi kelapa sawit lancar tidak ada kendala yang terjadi.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Langkah selanjutnya adalah berbagi pemahaman. Seiring dengan berlanjutnya kolaboratif, para pemangku kepentingan harus mengembangkan kesadaran serupa. Yang kami maksud dengan kesamaan pemahaman di sini adalah misi yang sama, tujuan yang sama, tujuan yang sama dan ideologi yang sama. Berikut hasil wawancara bersama manager PT Astra Agro Lestari Bapak Surya mengenai apakah Pemerintah Daerah dan PT Astra Agro Lestari memastikan terbentuknya pemahaman bersama terkait tujuan jangka panjang dalam pemberdayaan petani kelapa sawit.

”Pemerintah Daerah dan PT Astra Agro Lestari memastikan terbentuknya pemahaman bersama terkait tujuan jangka Panjang dalam pemberdayaan petani kelapa sawit itu ada dengan Dinas Pertanian dan PT Astra Agro Lestari ada melakukan perjanjian kerja sama sebagaimana petani itu bisa Sejahtera, penentuan harga salah satunya Dimana Perusahaan itu tidak semena mena menentukan harga, jadi ada patokannya. Belum bisa mengikuti tapi bisa memberikan alasan kepada Dinas karena ada nota kesepahaman.”
(wawancara dengan bapak Surya Kamis 25 Januari 2024).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pemahaman bersama antara Pemerintah Daerah dan PT Astra Agro Lestari dalam pemberdayaan petani kelapa sawit dalam jangka Panjang itu ada melakukan perjanjian agar petani kelapa sawit bisa Sejahtera. Salah satunya yaitu dengan menentukan harga kelapa sawit.

5. *Intermediate Outcomes (Hasil Antara)*

Langkah lain dalam proses kolaboratif berkaitan dengan hasil antara. Kerja sama dapat tercapai jika tujuan kerja sama tercapai, manfaat kerja sama jelas, dan keuntungan yang diperoleh kecil atau minimal. Kemenangan kecil yang terjadi dapat dilihat sebagai tanda keberhasilan kemitraan dan juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemitraan. Tentu saja, meskipun manfaatnya kecil, para pemangku kepentingan akan menganggap kerja sama ini bermanfaat. Berikut hasil wawancara bersama manager PT Astra Agro Lestari Bapak Surya mengenai pencapaian konkret yang telah dicapai melalui kolaboratif ini dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani kelapa sawit di wilayah Mamuju Tengah.

“Ada pencapaian konkret yang telah di capai melalui kerja sama ini dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani kelapa sawit di Wilayah Mamuju Tengah. Kalau di Tarik secara historis yang pertama itu Perusahaan tertua di Mamuju Tengah adalah PT Astra Agro Lestari, Perusahaan ini yang membuka Perkebunan kelapa sawit sebelum ada Perusahaan sawit yang lain. Pencapaian konkret itu ada seperti bisa menyejahterakan masyarakat, yang dulunya hanya ada tanaman coklat, pisang dan jeruk yang selalu gagal panen dan mengalami banyak kendala. Kemudian

masuk PT Astra Agro Lestari yang membuka lahan dan membagikan bibit kelapa sawit kepada masyarakat yang akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat hingga saat ini.” (wawancara dengan bapak Surya Kamis 25 Januari 2024).

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, hasil antara ini ada pencapaian konkrit yang di lakukan melalui kolaboratif ini. Pencapaiannya dapat di lihat hingga sekarang, Masyarakat lebih Sejahtera terutama pada petani kelapa sawit.

Penulis juga melakukan wawancara bersama bapak I Wayan Purnayase selaku ketua Dinas Perkebunan mengenai kendala utama yang di hadapi dalam kolaboratif ini.

“petani akan tetap menjual kelapa sawitnya meskipun harganya sangat rendah. Kendala utama disini yaitu ketidak adanya transparansi, nah ketika berbicara mengenai pembeli dan penjual sudah tentu ada kesepakatan mau atau tidak. Masalahnya yaitu ketidak adanya keterbukaan dari kedua belah pihak. Kalau kita merujuk pada peraturan pemerintah berdasarkan peraturan dinas pertanian sebenarnya kedua duanya mendapatkan keuntungan, petani memiliki kebun kelapa sawit itu setidaknya berlembaga hasil tanamannya itu tidak boleh di jual tetapi di titip olah ke pabrik, hasil dari pengolahan pabrik itu di hitung bersama sama itu sebenarnya aturannya, tidak langsung di tetapkan begitu saja, jadi petani tetap mendapatkan perhitungan. Limbah, cangkang, tangkos dan lain-lain itu milik petani bukan milik pabrik.” (wawancara dengan bapak I Wayan Purnayase Kamis 25 Januari 2024).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, seharusnya petani melakukan titip olah ke pabrik agar mendapatkan keuntungan yang lebih, karena ketika petani menjual kelapa sawitnya hasil yang di

dapatkan akan jauh lebih sedikit. Dan ketidak adanya keterbukaan ini mengakibatkan adanya kesalahpahaman dari kedua belah pihak.

“kalau petani menjual berarti bukan lagi milik petani, tapi kalau di titip olah itu milik petani karena bisa diambil lagi oleh petani. Maka penetapan harganya setelah TBS itu di peras menjadi CPO kemudian di jualkan oleh pabrik harga CPO nya itu berapa nanti di akumulasikan berdasarkan perkilo gram TBS. Jadi limbah sawit itu semuanya milik petani, maka keuntungannya ada di limbah petani mendapatkan keuntungan. Nah disisi lain ketika dititip olah, pabrik punya tanggung jawab terhadap petani dan kebun tanaman kelapa sawit, tanggung jawabnya yaitu perbaikan sarana dan prasarana.” (wawancara dengan bapak I Wayan Purnayase Kamis 25 Januari 2024).

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, jika petani menitip olah maka keuntungan di dapatkan itu jauh lebih besar karena dari pabrik juga memberikan bantuan berupa tanggung jawab untuk memenuhi sarana dan prasarana. Contohnya seperti memperbaiki infrastuktur jalan yang memudahkan petani untuk beraktivitas.

Penulis juga melakukan wawancara pada salah satu petani kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah terkait manfaat konkret seperti apa yang di peroleh petani kelapa sawit dari kolaboratif antara pemerintah dan Perusahaan.

“kalau manfaat yang konkret itu tentu ada, saya sebagai petani merasakannya, contoh saja seperti akses lebih baik, pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan infrastrktur. Ini semua akan dapat meningkatkan hasil panen.” (wawancara dengan bapak Hariyo Sabtu 3 Februari 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, petani merasakan manfaat dari kolaboratif ini yaitu, seperti akses yang lebih baik, dari kolaboratif tersebut dapat memberikan akses ke teknologi modern seperti varietas unggul, sistem irigasi dan peralatan pertanian yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu pemerintah dan Perusahaan juga membuat program pelatihan yang dapat membantu petani meningkatkan keterampilan mereka dalam budidaya dan manajemen kebun kelapa sawit. Dan juga kolaboratif antara pemerintah dan Perusahaan menyediakan investasi dan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan fasilitas pengolahan yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam rantai pasok kelapa sawit. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit, meningkatkan pendapatan petani dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Misdi sebagai ketua kelompok tani mengenai dampak positif yang dapat dilihat dalam peningkatan produksi kelapa sawit sebagai hasil dari kerjasama pemerintah dan swasta.

“Dampak peningkatan produktivitas petani kelapa sawit itu di liat dari pemerintah dan Perusahaan ini menyediakan akses yang lebih modern, pelatihan pertanian yang lebih baik dan pengembangan infrastruktur. Dengan begitu kami para petani kelapa sawit bisa mengoptimalkan pengolahan kebun kelapa sawit. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan bisa juga memperbaiki taraf hidup.” (wawancara dengan bapak Misdi Minggu 4 Februari 2024).

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, dampak dari peningkatan produktivitas bagi petani itu sangat membantu untuk memperbaiki perekonomian petani. Pemerintah memberikan regulasi yang mendukung investasi perusahaan dan memfasilitasi transfer pengetahuan, sementara Perusahaan dapat membawa inovasi dan sumber daya ke pabrik tersebut. Dengan kolaboratif yang baik, petani dapat meningkatkan praktik pertanian mereka, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, serta meningkatkan pendapatan mereka secara keseluruhan.

“peran masyarakat itu penting. Masyarakat itu bisa jadi pengawas dalam memastikan bahwa kolaboratif itu berjalan transparan dan menguntungkan semua pihak termasuk petaninya.” (wawancara dengan bapak Misdi Minggu 4 Februari 2024).

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, petani memiliki peran yang sangat penting. Petani dapat memberikan masukan dan umpan balik kepada pemerintah dan Perusahaan mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh petani, serta memastikan bahwa kegiatan kolaboratif tersebut memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Melalui partisipasi aktif masyarakat, kolaboratif antara pemerintah dan swasta dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

b. Manfaat Dan Dampak Positif Dari Kolaboratif Pemerintah Dan Swasta Bagi Petani Kelapa Sawit Dan Masyarakat Sekitar

Dari kolaboratif pemerintah dan swasta ini terdapat manfaat dan dampak positif bagi petani kelapa sawit. Berikut ini dijelaskan faktor-faktor tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian:

“manfaat dari kolaboratif ini salah satunya yaitu bisa meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. Melalui transaksi jual beli kelapa sawit, otomatis kesejahteraan petani kelapa sawit juga akan terjamin selama ada pabrik.” (wawancara dengan bapak Misdi Minggu 4 Februari 2024).

Hasil dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa, manfaat dari kolaboratif antara pemerintah dan swasta ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit dengan cara transaksi kelapa sawit.

“kalau dampak itu sangat positif yah apa lagi kalau di lihat dari dalam peningkatan produksi kelapa sawit sebagai hasil dari kolaboratif ini. Contohnya itu seperti lahan kelapa sawit semakin luas otomatis dapat menciptakan lapangan kerja seperti pemanen, pemuat, dan driver.” (wawancara dengan bapak Misdi Minggu 4 Februari 2024).

Hasil dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, dampak dari kolaboratif antara pemerintah dan swasta ini sangat baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

C. Pembahasan

Dalam bagian ini terdapat penjelasan topik yang sesuai dengan temuan penelitian, sehingga pembahasan ini peneliti akan menggabungkan hasil penelitian dengan teori yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Hal

ini sejalan dengan metode analisis deskriptif yang di gunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Identifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang diinginkan dengan menggunakan 5 indikator teori. Adapun pemebahasan terkait mengenai Collaborative Governance Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

a. Berdasarkan 5 Indikator Dari Teori Menurut Ansel And Gash

1. *Face-To-Face Dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Kolaborasi dibangun melalui dialog langsung antar pemangku kepentingan. Karena kerja sama itu sendiri didasarkan pada konsensus, maka diperlukan komunikasi mendalam atau dialog langsung untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah dan Perusahaan sangat bermanfaat karena telah menghadirkan inovasi yang dapat membantu untuk mengefisiensikan waktu. Inovasi yang di hadirkan seperti mesin sprayer sangat mudah untuk digunakan dan dapat menghemat waktu.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut peneliti dialog tatap muka ini sudah berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan Bersama.

2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Terbentuknya kepercayaan antar subjek tidak ada bedanya dengan Langkah awal dialog langsung. Namun, seorang pemimpin yang baik harus mampu memahami pentingnya kepercayaan antar pihak sebelum memanipulasi keadaan. Lebih lanjut, jika terdapat Sejarah ketidakharmonisan antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka membangun kepercayaan antar pihak akan menjadi faktor penentu dalam Kerjasama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa untuk membangun kepercayaan bersama adalah dengan cara menetapkan harga kelapa sawit pada petani. Hal ini dilakukan agar aktivitas yang dijalankan secara bersama untuk menerima hasil yang maksimal dan dapat menyejahterakan petani kelapa sawit.

Hal ini dapat dilihat dari masyarakat sendiri dengan di tetapkannya harga kelapa sawit masyarakat memiliki penghasilan tetap di setiap bulannya yang menjadikan perekonomian masyarakat stabil.

3. *Commitmen To The Process* (Komitmen Terhadap proses)

Komitmen dikaitkan dengan keberhasilan kerjasama, komitmen merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi untuk berpartisipasi dalam kerjasama. Dikatakan bahwa terkadang pemangku kepentingan berpartisipasi karena mereka mempunyai kepentingannya sendiri. Misalnya agar kepentingan merka tidak

terabaikan, untuk menjamin kedudukannya atau untuk menghormati hukum. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat harus ikut serta dalam proses yang sama, yaitu negosiasi merupakan cara terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat evaluasi rutin yang akan dilakukan oleh Dinas Perkebunan terkait mekanisme kinerja pada Perusahaan. Dinas Perkebunan akan datang untuk melihat secara langsung apakah ada kendala dalam memproduksi kelapa sawit.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti komitmen terhadap proses ini sudah sangat baik dimana pemerintah dan Perusahaan ini sudah berpartisipasi dalam bekerjasama dan sudah melakukan kebijakan yang baik.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Langkah selanjutnya adalah berbagi pemahaman. Seiring dengan berlanjutnya kolaboratif, para pemangku kepentingan harus mengembangkan kesadaran serupa. Yang kami maksud dengan kesamaan pemahaman di sini adalah misi yang sama, tujuan yang sama dan ideologi yang sama.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu yang dilakukan oleh pemerintah dan Perusahaan dalam pemberdayaan petani kelapa sawit dalam jangka Panjang itu dengan melakukan perjanjian agar petani kelapa sawit Sejahtera. Salah satunya dengan menentukan harga kelapa sawit.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut peneliti pemahaman bersama ini sudah berjalan dengan baik. Pemerintah dan Perusahaan sudah melakukan tujuan bersamanya dengan melakukan pemberdayaan petani kelapa sawit dengan waktu jangka Panjang dan menentukan harga kelapa sawit, hal ini dapat menyejahterakan petani kelapa sawit.

5. *Intermediate* (Hasil Antara)

Langkah lain dalam proses kolaboratif berkaitan dengan hasil antara. Kerja sama dapat tercapai jika tujuan kerja sama dapat tercapai jika tujuan kerja sama tercapai, manfaat kerja sama jelas, dan keuntungan yang diperoleh kecil atau minimal. Kemenangan kecil yang terjadi dapat dilihat sebagai tanda keberhasilan kemitraan dan juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemitraan. Tentu saja, meskipun manfaatnya kecil, para pemangku kepentingan akan menganggap kerja sama ini bermanfaat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pencapaian konkrit yang dilakukan melalui kolaboratif ini. Pencapaiannya dapat dilihat hingga saat ini, dimana masyarakat lebih Sejahtera terutama pada petani kelapa sawit.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut peneliti hasil antara ini sudah terlaksana dengan baik, dapat di lihat sendiri taraf hidup petani sudah terbilang sangat baik.

b. Manfaat Dan Dampak Positif Dari Kolaboratif Pemerintah Dan Swasta

Manfaat dari kolaboratif ini yang utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. Dan dampak dari kolaboratif ini terbilang sangat positif karena mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Dampak positif lainnya dapat dilihat dari peningkatan produksi kelapa sawit yang baik sebagai hasil dari kolaboratif ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis melalui data yang didapatkan di lapangan, dengan ini saya selaku peneliti menyimpulkan bahwa:

Kolaboratif antara pemerintah dan PT Astra Agro Lestari di Kabupaten Mamuju Tengah ini dalam upaya pemberdayaan petani kelapa sawit sangatlah baik dimana kolaboratif ini dapat meningkatkan produksi kelapa sawit sehingga petani bisa sejahtera dan meningkatnya taraf hidup. Kolaboratif ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bisa memperluas lapangan pekerjaan.

Manfaat dan dampak dari kolaboratif ini yaitu:

- 4) Mampu menyejahterakan petani kelapa sawit.
- 5) Memberikan dampak yang positif seperti peningkatan produksi kelapa sawit.
- 6) Memperluas lapangan pekerjaan.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih berperan penting dalam melakukan pemberdayaan petani khususnya petani kelapa sawit dimana pemerintah daerahlah yang mempunyai kewajiban dalam hal tersebut.
2. Pemerintah dan PT Astra Agro Lestari agar lebih meningkatkan lagi kinerja Kerjasama dalam memberdayakan para petani kelapa sawit.
3. Pemerintah dan swasta harus melakukan transparansi karena ini sangat penting untuk memastikan bahwa kolaboratif ini berdasarkan prinsip transparansi serta memastikan bahwa keuntungan dari kolaboratif ini didistribusikan secara adil di antara semua pihak yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

- Alhada, M., Habib, F., Islam, U., Sayyid, N., Rahmatullah, A., Kreatif, E., & Ekonomi, P. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif 1. 1(2), 82–110.
- Ariesmansyah, A., Ariffin, R. H. B., & Respati, L. A. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata. 14, 58–72.
- Ayun, Q., Kurniawan, S., Saputro, W. A., Program, M., Agribisnis, S., Duta, U., Surakarta, B., Agribisnis, P. S., Duta, U., & Surakarta, B. (2020). Perkembangan konversi lahan pertanian di bagian negara agraris. 5(2), 38–44.
- Adiawaty, S. (2020). MEMPENGARUHI PEMBERDAYAAN. 23(3), 397–403.
- Apriliyani, D., Handayani, W., Publik, A., Ilmu, F., Politik, I., Diponegoro, U., Perencanaan, M., Teknik, F., Diponegoro, U., Perencanaan, D., Teknik, F., & Diponegoro, U. (2022). Implementasi Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. 10(1), 1–8.
- DEDI. (2022). Gapki: Produksi Minyak Sawit Selama Januari 2022 Turun. Republika.
- Endah, K., Galuh, U., & Lokal, P. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI. 6, 135–143.
- Ernanda, D. (2017). PENGARUH *STORE ATMOSPHERE* , *HEDONIC MOTIVE* DAN *SERVICE* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 6.
- Fatimah, P., Mahsyar, A., & Kasmad, R. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kabupaten Wajo. *Jurnall Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 294–307.
- Febrian, R. A. (2016). *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Kawasan

Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). II, 200–208.

Alhada, M., Habib, F., Islam, U., Sayyid, N., Rahmatullah, A., Kreatif, E., & Ekonomi, P. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif 1. 1(2), 82–110.

Haris, A. (2014). Melalui Pemanfaatan Media. Xiii(2).

Ardi, M. (2020). Penelitian Eksperimen Untuk Meningkatkan Pengetahuan Lingkungan , Komitmen Lingkungan , dan *Locus Of Control* Masyarakat Petani Sawit. 4, 19–30.

Mahsyar, A. (2015). *Public private partnership*: kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pengelolaan aset publik di kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 71–80.

maria. (2020). Indonesia Butuh Banyak Lembaga Riset untuk Berdayakan Plasma <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/193>. Kompas.Com.

Muhammad yahya. (2023). *Mapping the Environmental Education Policies for the Youth to Encourage Rural Development and to Reduce Urbanisation: Econometric Approach*. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=y5L2Y2cAAAAJ&citation_for_view=y5L2Y2cAAAAJ:f2IySw72cVMC

Patadjenu, S., & Silitonga, M. S. (2023). Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Kepariwisata Indonesia* .

Riadi, S., & Manurung, L. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao Di Kabupaten Berau Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

Ridwan, I. R., Upi, D. P., & Banten, S. (n.d.). Dampak industri terhadap lingkungan dan sosial.

Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research*

Approach).

https://books.google.co.id/books?id=qy1qDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false

Safardan, M. Y., Sulistiyanto, S., & ... (2023). Strategi Kolaborasi Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Dalam Mendukung Pertahanan Negara.

Sayuti, A. T., Qodri, M. A., & Putra, T. D. (2020). Asas Proporsionalitas Perjanjian: Urgensi Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit.

Srikandi, S., & Ubaidullah, U. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Konflik dan Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Masyarakat Kecamatan Trumon Timur Dengan PT. Asdal.

sugiyono. (2014). metode penelitian kualitatif.

Tampubolon, J., & Nainggolan, H. L. (2021). Lembaga Petani Kelapa Sawit Sebagai Wadah Pengembangan dan Modernisasi Sawit Rakyat.

Sinta, D. (n.d.). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk.*

Ubaidillah. (2021). Kinerja Ekspor Kelapa Sawit Topang Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi.

Wicaksono, A. (2019). Kolaborasi multi aktor dalam program restorasi gambut di Provinsi Riau.

Yuda. (2022). Profil Provinsi Sulawesi Barat: Sejarah, Geografi & Peta Wilayah.

Zainuddin, M., & Salman, R. N. (2022). Studi Kolaborasi Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Limbah Sampah Masyarakat di Desa Karossa Mamuju Tengah.



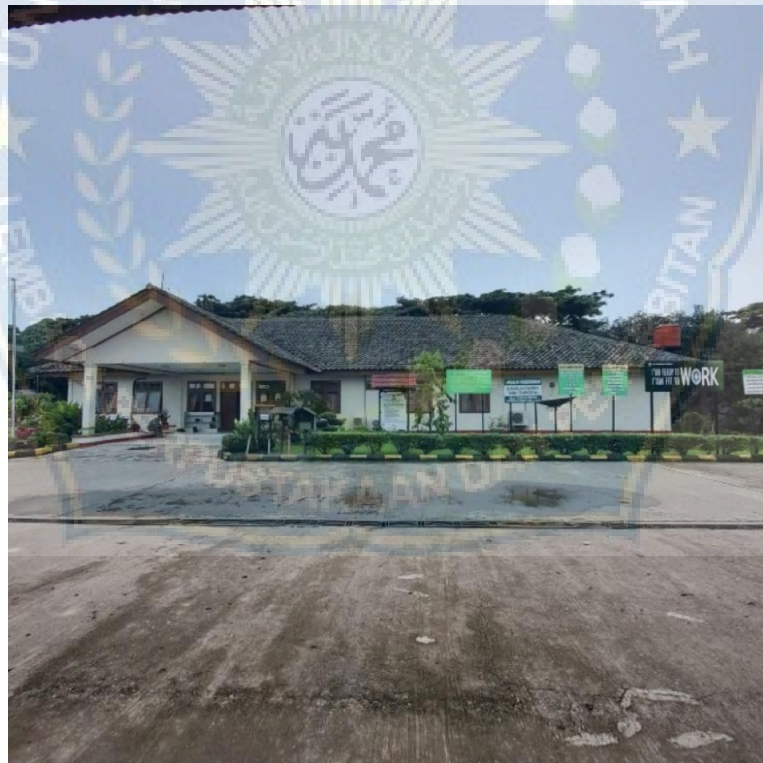
DOKUMENTASI



Pengambilan gambar Tugu PT Astra Agro Lestari di Kecamatan Budong-Budong, tepatnya 25 Januari 2024.



Pengambilan gambar Tugu PT Astra Agro Lestari di Kecamatan Budong-Budong, tepatnya 25 Januari 2024.



pengambilan gambar Kantor Pt Astra Agro Lestari di Kecamatan Budong-Budong, tepatnya pada tanggal 25 Januari 2024.



Wawancara Dengan Bapak Surya Selaku Manager Pt Astra Agro Lestari di ruang kantor PT Astra Agro Lestari di Kecamatan Budong-Budong, tepatnya pada 25 Januari 2024.



Pengambilan gambar di Kantor Dinas Pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya pada 25 Januari 2024.



pengambilan gambar moto dan visi misi Dinas Pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya pada 25 Januari 2024.



Wawancara Bersama Bapak I Wayan Purnayase S.P Selaku Ketua Bidang Perkebunan, di ruang kerjanya di Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya pada 25 Januari 2024.



Wawancara dengan salah satu petani di kebun sawit yang berada di Kecamatan Budong-Budong Bersama Bapak Hariyo, tepatnya pada 3 Februari 2024.



Wawancara bersama Bapak Misdi Selaku Ketua Kelompok Tani, di rumahnya yang berada di Kecamatan Budong-Budong, tepatnya pada 4 Februari 2024.



Universitas
Muhammadiyah
Makassar
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alaiddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email: ifisip@unismuh.ac.id
Official Web: <http://ifisip.unismuh.ac.id>



Nomor : 2908/FSP/A.1-VIII/XII/1445 H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Aryanti Puji Arlian
Stambuk : 10564 11035 20
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
Judul Skripsi : *"Collaborative Governance Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu. Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 23 Desember 2023

Ketua Jurusan IP



Amad Harakan, S.IP.M.H.I

NIM: 1207 163



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3133/05/C.4-VIII/XII/1445/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 Desember 2023 M
10 Jumadil akhir 1445

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Mamuju Tengah

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Sulawesi Barat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2908/FSP/A.1-VIII/XII/1445 H/2023M tanggal 23 Desember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ARYANTI PUJI ARLIAN**

No. Stambuk : **10564 1103520**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Collaborative Governance Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 Januari 2024 s/d 4 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761

12-23



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Daeng Maccirinnae Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah 91563
Pos-el : dpmtsp.mateng@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor B/500.16.7.4/11/DPMPTSP/II/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 3. Surat dari Universitas Muhammdiyah Makassar, No.3133/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 Tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama	ARYANTI PUJI ARLIAN
NIM	10564 1103520
Program Studi	Ilmu Pemerintahan (S1)
Alamat	Dusun Sidomulyo Polongaan Tobadak
No. HP	085813755887
Untuk	Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dengan Judul "Collaborative Governance Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah "
	Lokasi Penelitian di Pontanakayang, Kec. Budong-Budong , Kab. Mamuju Tengah
	Waktu/Lama Penelitian, Januari s/d Februari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Mamuju Tengah, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar copy hasil penelitian Kepada Bupati Mamuju Tengah Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tobadak, 22 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,



Drs. SALMAN ALI, M.Pd.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19631130 199303 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju Tengah (Sebagai Laporan) di Tobadak :
2. Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Tobadak;
4. Peninggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Aryanti Puji Arlian

Nim : 105641103520

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 April 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Aryanti Puji Arlian, dilahirkan di Kecamatan Tobadak pada 11 Juli 2002, Merupakan anak Pertama dari pasangan Hariyo Puji Baroto dan Ibu Suparyanti. Penulis Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Polongaan dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Tobadak dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Tobadak dan lulus pada tahun 2020.

Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan ketekunan untuk terus belajar dan berusaha serta dukungan dari orang terkasih, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Pada Tahun 2024 tepatnya pada 08 Mei 2024, penulis dikukuhkan dengan gelar sarjana ilmu politik (S.IP) dengan judul penelitian “*Collaborative Governance* Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat”. Semoga dengan adanya karya ilmiah ini dapat menjadi kontribusi bagi peneliti lain, dan bagi penulis sendiri, Terimakasih.